

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
INTISARI	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Kontribusi Penelitian	11
D. Keaslian Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Pengertian <i>Business Judgment Rule</i> (BJR)	19
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	21
C. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha Milik Negara	26
D. Tinjauan Umum Tentang Korupsi	31
E. Tinjauan Mengenai Kerugian Negara	34
F. Kerangka Teori/Analisis	36
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	42
B. Jenis Data dan Bahan Hukum	44
C. Cara dan Alat Pengumpulan Data	47
D. Analisa Data	48
E. Tahap, Kendala, dan Keterbatasan Penelitian	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Paradigma Pengaturan Pertanggungjawaban Direksi BUMN Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara	51
1. Pergeseran Makna Kekayaan BUMN dan Modal BUMN.....	55
2. Penyertaan Modal Negara (PMN).....	65
3. Perubahan Status Anggota Direksi BUMN	68
4. Implikasi Terhadap Tata Kelola dan Pertanggungjawaban Direksi.....	71
B. Implikasi Pertanggungjawaban Direksi BUMN Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara	77
1. Pemberlakuan doktrin <i>Business Judgment Rule</i>	84
2. Pemisahan kualifikasi perbuatan direksi melalui pidana atau perdata..	88
BAB IV KESIMPULAN	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	100